



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 02 Juni 2023

Halaman: 1

Disdikpora Siapkan Pengganti ASPD

Disdikpora Siapkan...

Agar kreativitas siswa terwadahi dengan baik, pemerintah wajib memberikan kemerdekaan belajar. Nadiem pun meminta Pemda DIY menghapus ASPD karena membebani siswa.

"Iya kami dengar langsung, alasan utamanya tidak sinkron karena membebani siswa tingkat akhir dengan ujian-ujian ASPD," kata Kepala Disdikpora DIY Didik Wardoyo, Rabu (31/5). Didik mengatakan Disdikpora DIY bakal mengambil beberapa langkah terkait dengan kritikan Mas Menteri.

Didik menilai saran tersebut patut diperhitungkan. "Sudah kami pertimbangkan dan akan kami koordinasikan dengan berbagai pihak, terutama kabupaten/kota DIY sebagai pihak pelaksana, selain itu kami juga akan adakan *focus group discussion* (FGD) untuk mengali lagi saran tersebut," katanya.

Didik tengah mempersiapkan asesmen pengganti ASPD apabila program tersebut nantinya dihapus. Penilaian tersebut sangat penting sebagai cara Pemda DIY untuk mengukur kualitas pendidikan.

ASPD hanya ada ada di DIY dan sudah berjalan tiga tahun sejak 2021 saat UN dihapus. "Karena UN dihapus waktu itu kami berebut apa yang perlu dilakukan agar pematian hasil belajar ini dapat dilakukan dan jadi bahan untuk memastikan kualitas pendidikan di sekolah dapat terus dievaluasi. Akhirnya kami menyelenggarakan ASPD," ujarnya.

ASPD juga digunakan untuk memetakan hasil belajar siswa se-DIY dan mengantisipasi kesenjangan pendidikan antarkabupaten dan kota. Nilai ASPD siswa dipakai sebagai acuan dalam PPDB di tingkat SMP dan SMA/SMK. Menurut dia, ASPD didukung semua pihak.

"Masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, Dewan Pendidikan DIY, akademisi, semua mendukung ini karena PPDB SMA/SMK ini tidak bisa hanya dengan zonasi. Kalau hanya berdasarkan zonasi, masyarakat akan gaduh," katanya.

Didik bersikukuh ASPD sudah mengikuti Kurikulum Merdeka Belajar. "Kurikulum Merdeka kan mendorong siswa dalam literasi bacaan, literasi numerasi, dan literasi sains. Semuanya ada dalam materi ujian ASPD, sehingga tidak bertentangan," katanya.

Kualitas Pendidikan

Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Sutrisna Wibawa, menilai ASPD merupakan upaya mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2005-2025 yakni sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara (ASEAN) pada 2025.

Guna mewujudkan visi tersebut, sistem pendidikan perlu mengacu pada *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang merupakan asesmen untuk menguji kualitas pendidikan. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai evaluasi sistem pendidikan daerah tersebut.

Melalui ASPD yang menguji kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, peserta didik DIY dengan sendirinya telah disiapkan agar memiliki kualitas yang setara.

DIY harus mempertahankan PISA yang diukur dari kemampuan membaca, matematika, dan kemampuan dasar. Kalau DIY tidak menyelenggarakan ASPD, berarti persiapan asesmen yang sifatnya internasional bisa lenyap. ASPD penting untuk menyiapkan asesmen nasional maupun internasional," katanya. Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai ASPD masih diperlukan DIY untuk dapat mengetahui mutu pendidikan. "Secara substansial, ASPD dipakai untuk melihat mutu pendidikan. Bagi sekolah, ASPD bisa menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan," katanya.

Persoalan manajemen waktu penyelenggaraan asesmen juga harus dipikirkan. Menurut Agustinus Subarsono, ASPD kurang tepat apabila diselenggarakan menjelang akhir tahun ajaran. Siswa akan

merasa tidak nyaman, karena sudah menjalani banyak ulangan dan masih harus mengikuti ujian lagi.

Asesmen untuk siswa sebaiknya diselenggarakan di tengah tahun ajaran sehingga hasil evaluasinya dapat diterapkan pada siswa tersebut.

Sistem Bersama

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudhana mengatakan ujian ASPD diperlukan untuk menjamin kualitas pendidikan DIY bisa merata dan memiliki tolok ukur bersama.

Da menegakan DIY merupakan daerah yang kecil tetapi memiliki visi untuk terus menjadi daerah unggulan pendidikan tingkat nasional.

"Kami ingin kualitas pendidikan antara kabupaten dan kota tidak jomplang, cara mengetahui tingkat ketersejajaran seperti apa kan lewat asesmen bersama yaitu ASPD," jelasnya, Rabu. Huda menceritakan setelah Meteri Nadiem menghapus ujian nasional (UN) pada 2021 silam, Dinas Pendidikan DIY dan kabupaten/kota merembuk sistem bersama agar kualitas pendidikan di DIY tetap terjaga kualitasnya.

"Tidak ada pertentangan antara ASPD dan Kurikulum Merdeka, sama-sama melengkapi satu sama lain malahan. Sekolah-sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum itu dengan baik," ujarnya.

Kepala SMP Negeri 3 Depok, Slemman, Darto, mengatakan ASPD menjadi salah satu ikhtiar untuk terus menguatkan literasi numerasi di DIY. ASPD juga memudahkan PPDB di SMP dan SMA sebagai embrio pendidikan tinggi.

"Pelaksanaan pendidikan di Jogja tidak hanya cukup menggunakan Kurikulum Merdeka. DIY perlu penyesuaian dan penguatan untuk mendukung keistimewaan. ASPD mestinya dipandang sebagai penguatan yang memberikan nilai plus untuk implementasi Kurikulum Merdeka," katanya.

JOGJA-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY bakal menghapus asesmen standardisasi pendidikan daerah (ASPD) setelah mendapatkan kritikan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Triyo Handoko & Stefan Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Disdikpora DIY sedang mempersiapkan pengganti ASPD jika program tersebut nantinya dihapus.
- ▶ ASPD merupakan upaya untuk dapat mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY 2005-2025.

Saat bertemu dengan Wakil Cubenur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, Nadiem mengevaluasi penerapan ASPD. Nadiem menilai ASPD adalah warisan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka.

ASPD hampir sama dengan Ujian Nasional (UN) yang sudah dihapus. Nilai ASPD dipakai siswa dalam Penentuan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA/SMK di DIY.

Menteri Nadiem mengatakan saat ini siswa menumbuhkan sistem pendidikan yang mengakomodasi kreativitas dan potensi siswa yang bermacam-macam.

► Halaman 10

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005